

LAMPIRAN

Bukti Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antonius Suryo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 76918201 Fax (024) 76918209
Laman: www.fh.undip.ac.id Pos-el: [fh\[at\]live.undip.ac.id](mailto:fh[at]live.undip.ac.id)

Nomor : 339 /UN7.F1/AK/V/2026
Lamp. :
Hal : Permohonan Riset/ Penelitian

12 MAY 2026

Yth. Kepala Kantor Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Jl. Perintis Kemerdekaan No.175 Km 14 Semarang 50265

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) sesuai dengan kurikulum Program S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Bapak/ Ibu berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian dilingkungan instansi Bapak/ Ibu kepada mahasiswa berikut:

Nama : Syadza Ardelin Maurilla Nevasya
NIM : 11000122140553
Alamat : Jl. Srikaton Barat No. 70, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang
Nomor HP : 081542155519
Bidang Minat : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Peranan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah Dalam Menjamin Akuntabilitas Keuangan Negara Berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terimakasih.


Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Zoom Meeting

Upgrade Zoom

Protected View: Be careful—files from the Internet can contain viruses. Unless you need to edit, it's safer to stay in Protected View. [Enable Editing]

Jawaban Wawancara

1. Bagaimana gambaran umum tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara?

Jawaban:

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah merupakan satuan kerja Badan Pemeriksa Keuangan pada tingkat provinsi yang berkedudukan di Kota Semarang. Secara kelembagaan, perwakilan ini berada dalam pembinaan teknis Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

Tugas pokok perwakilan adalah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, serta lembaga lain yang mengelola keuangan daerah.

Dalam menjalankan tugas tersebut, perwakilan menyelenggarakan beberapa fungsi pokok, antara lain:

- perumusan kebijakan dan rencana kegiatan pemeriksaan pada tingkat perwakilan dengan mengacu pada Rencana Implementasi Rencana Badan Pemeriksa Keuangan;
- pelaksanaan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, kecuali pemeriksaan investigatif yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Investigasi;
- penetapan tim pemeriksa serta pengendalian mutu pemeriksaan;
- pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
- penyusunan laporan hasil pemeriksaan yang mengandung indikasi tindak pidana untuk

Page 1 of 13 5470 words

Focus 100%

Syadza Ardein

Rendy Bagus Nugraha_D.PKN VII